

Judul : Tak Ada Relaksasi untuk Freeport
Tanggal : Jumat, 28 Agustus 2020
Surat Kabar : Republika
Halaman : 5

Tak Ada Relaksasi untuk Freeport

Permintaan Freeport mengundur penyelesaian smelter tak direstui pemerintah.

■ INTAN PRATIWI

JAKARTA — PT Freeport Indonesia (PTFI) meminta kepada pemerintah agar pabrik pemurnian atau smelter tembaga yang semula harus beroperasi pada 2023 mundur menjadi 2024. Hal ini dikarenakan kontraktor pembangunan menyatakan tidak bisa membangun smelter apabila didesak pada 2023 mendatang.

Wakil Direktur Utama PTFI Jenpino Ngabdi menjelaskan, saat ini progres pembangunan smelter baru 5,86 persen. Padahal, seharusnya memasuki semester kedua tahun ini, target pembangunan smelter menginjak 10,5 persen.

"Hasil verifikasi progres smelter sampai Juli 2020 ini secara fisik 5,86 persen dari rencana 10,5 persen. Verifikasi ini dilakukan oleh Surveyor Indoneisa. Dari yang sudah dilaksanakan *feasibility study*, perencanaan praprojek atau *front end engineering design* (FEED) itu sudah selesai dan juga pemadatan lahan," kata Jenpino di Komisi VII DPR RI, Jakarta, Kamis (27/8).

Jenpino menjelaskan, karena dampak Covid-19 membuat progres pembangunan berjalan lambat. Ia menjelaskan, vendor kontraktor PTFI kesulitan dalam mobilisasi masa dan barang karena Covid-19 ini. Hal ini yang membuat selama enam bulan terakhir tak ada aktivitas apa pun dalam pembangunan smelter.

"Vendor kami dan *engineering, procurement, and construction* (EPC) kontraktor kami saat ini belum bisa finalisasi. Mereka

ada kendala akibat pembatasan di negara mereka karena wabah ini. Jadi sulit mereka. Ada vendor yang sudah aktif, ada yang belum. Makanya, EPC ini belum final biasanya," ujar Jenpino.

Presiden Direktur PTFI Tony Wenas juga sempat mengatakan, pembangunan pabrik pemurnian atau smelter tembaga tidaklah menguntungkan, baik bagi perusahaan maupun negara. Sebab, nilai tambah harga jual dari konsentrat ke tembaga katoda hanya lima persen.

Tony menjelaskan, nilai tambah yang hanya lima persen ini tidak sebanding dengan harga jual jika diekspor dan *spending* yang harus dikeluarkan oleh negara dan perusahaan. Meski begitu, Tony mengatakan, karena sudah termut dalam peralihan kontrak karya, akan tetap dilakukan.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) hingga

saat ini belum memberikan lampu hijau untuk PTFI memundurkan jadwal operasional smelter. Pemerintah masih yakin smelter PTFI masih bisa selesai tepat waktu.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Ridwan Djamaludin mengatakan, saat ini memang progres pembangunan smelter PTFI baru 5,86 persen karena pandemi praktis sudah enam bulan PTFI tak melakukan aktivitas pembangunan di Gresik, Jawa Timur.

"Memang kalau dilihat dari target, masih di bawah target. Saat ini, lahan memang sudah diselesaikan, tetapi memang ada kendala. Namun, kami masih akan tetap berpegang pada aturan undang-undang (UU) yang berlaku," ujar Ridwan.

Soal smelter ini, Komisi VII DPR RI juga kompak untuk mendesak Kementerian ESDM untuk tidak memberikan relaksasi sedikit pun bagi PTFI. Mendengar hal ini, Ridwan pun dalam akhir rapat mengatakan, dia akan tetap berpegang teguh pada aturan dan kesepakatan yang berlaku.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno menjelaskan, pembangunan smelter PTFI bukan sekadar wacana. Smelter tersebut merupakan salah satu bagian dari perjanjian penting dua negara. Ia mendesak pemerintah jangan memberikan izin PTFI memundurkan target pembangunan smelter.

PTFI telah berjanji ketika diberikan perpanjangan kontrak pengelolaan tambang Grasberg dengan berubah jenis kontraknya dari kontrak karya (KK) menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK), yaitu menyelesaikan pembangunan smelter yang telah ditetapkan, yakni pada 2023.

■ ed: citra listya rini



Smelter tersebut merupakan salah satu bagian dari perjanjian penting dua negara.